

**LAPORAN KEGIATAN KOMISI I DPR RI  
DALAM MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2020-2021  
TANGGAL 14 AGUSTUS – 8 NOVEMBER 2020  
(Masa Sidang Mulai Tanggal 14 Agustus – 5 Oktober 2020  
dan Masa Reses Mulai Tanggal 6 Oktober – 8 November 2020)**

---

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 59 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menjelaskan tentang tugas Komisi dalam bidang pembentukan undang-undang (legislasi), anggaran, dan pengawasan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 adalah sebagai berikut:

**I. FUNGSI LEGISLASI**

**1. RUU Usul Inisiatif Prioritas Pemerintah Tahun 2020**

**RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP)**

Terkait dengan RUU PDP, pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021, Komisi I DPR RI telah melaksanakan:

- a. Raker dengan Pemerintah (Menkominfo, Mendagri, dan Menkumham) pada tanggal 1 September 2020 dalam rangka:
  - 1) Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pelindungan Data Pribadi
  - 2) Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pelindungan Data Pribadi
  - 3) Penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Sandingan Fraksi kepada Pemerintah
  - 4) Pembahasan jadwal dan mekanisme Rapat Pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi
  - 5) Pembentukan Panja Pembahasan RUU tentang Pelindungan Data PribadiDalam Raker tersebut, Fraksi-Fraksi di Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk melaksanakan pembahasan RUU PDP.
- b. Raker dengan Pemerintah (Menkominfo, Mendagri, dan Menkumham) pada tanggal 7 September 2020 dalam rangka pembahasan materi Daftar Inventarisasi

Masalah (DIM) RUU tentang Pelindungan Data Pribadi. Dalam Raker tersebut telah disepakati dan menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Jumlah DIM RUU PDP
  - 2) Klasifikasi DIM RUU PDP
  - 3) DIM Usulan Tetap sebanyak 66 DIM, dengan catatan bahwa DIM ini dapat dibuka kembali apabila ada keterkaitan dengan pembahasan substansi DIM lainnya.
  - 4) DIM Usulan Tetap dengan catatan, Usulan Perubahan Substansi, Usulan Baru, dan DIM Penjelasan dibahas oleh Panja.
  - 5) DIM Usulan Perubahan Redaksional dibahas oleh Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin).
- c. Rapat Panja Pembahasan RUU PDP pada tanggal 1 Oktober 2020 dalam rangka pembahasan materi DIM RUU tentang PDP. Dalam Rapat tersebut telah dibahas Cluster DIM Usulan Tetap dengan Catatan.
- d. Selanjutnya Panja akan melanjutkan pembahasannya terhadap materi DIM RUU PDP pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021.

## **2. RUU Kumulatif Terbuka**

**RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden concerning Cooperation in the Field of Defence*)**

Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 telah melaksanakan pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam bidang Pertahanan. Komisi I DPR RI telah melaksanakan:

- a. RDPU dengan Pakar/Akademisi (Prof. Huala Adolf, S.H. LL.M., Ph.D.; Edy Prasetyono, S.Sos., MIS., Ph.D.; Evan A. Laksamana, Ph.D.; Laksamana Madya TNI Dr. Amarulla Oktavian, S.T., M.Sc., DESD., CIQNR; dan Curie Maharani Savitri, Ph.D.) pada tanggal 8 September 2020 dalam rangka mendapatkan pandangan dan masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam bidang Pertahanan.
- b. Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menhan, Menkumham, dan Menlu) dalam rangka Pembicaraan Tingkat I untuk Pembahasan dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah

Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam bidang Pertahanan pada tanggal 30 September 2020. Dalam Raker tersebut Fraksi-Fraksi di Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat dan menyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam bidang Pertahanan untuk selanjutnya dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

- c. Selanjutnya Pembicaraan Tingkat II terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam bidang Pertahanan telah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 5 Oktober 2020. Rapat Paripurna menyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam bidang Pertahanan dan selanjutnya dapat disampaikan kepada Presiden guna disahkan menjadi undang-undang.

## **II. FUNGSI ANGGARAN**

Sesuai dengan penjadwalan Rapat dari Badan Anggaran DPR RI, Komisi I DPR RI pada:

1. tanggal 2-3 September 2020 telah melaksanakan Raker/RDP dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI, yaitu: Menkominfo, Menhan, Menlu, Kepala BIN, Kepala BSSN, Kepala Bakamla, Gubernur Lemhannas, Sesjen Wantannas, dan Dirut LPP RRI dalam rangka pembahasan Laporan Keuangan TA 2019 dan hasilnya telah disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI.
2. tanggal 7-14 September 2020 telah melaksanakan Raker/RDP dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI, yaitu Menkominfo, Menhan dan Panglima TNI, Menlu, Kepala BIN, Sestama BSSN, Sestama Bakamla, Sestama Lemhannas, Sesjen Wantannas, dan Dirut LPP RRI dalam rangka pembahasan RKA KL TA 2021 dan hasilnya telah disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dapat ditindaklanjuti.
3. tanggal 21-24 September 2020 telah melaksanakan Raker/RDP dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI, yaitu: Menkominfo, Menhan dan Panglima TNI, Menlu, Kepala BIN, Kepala BSSN, Kepala Bakamla, Gubernur Lemhannas, Sesjen Wantannas, Dirut LPP RRI, dan Direksi LPP TVRI dalam rangka pembahasan penyesuaian RKA KL TA 2021 dan hasilnya telah disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dapat ditindaklanjuti.

### III. FUNGSI PENGAWASAN

Terkait dengan fungsi pengawasan, pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 Komisi I DPR RI telah melaksanakan:

#### 1. Raker/RDP dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pengawasan yang waktu pelaksanaannya bersamaan dengan pembahasan penyesuaian RKA KL Mitra Kerja Komisi I DPR RI T.A. 2021, yaitu:

- a. Raker dengan Menlu pada tanggal 22 September 2020 dalam rangka membahas isu-isu aktual bidang luar negeri, antara lain:
  - 1) Perlindungan WNI, diplomasi, dan perdagangan Indonesia di Era New Normal
  - 2) Prediksi Pemilu AS dan dampaknya bagi bilateral Indonesia-AS
  - 3) Perkembangan diplomasi vaksinRapat dilaksanakan dalam Rapat bersifat tertutup.
- b. Raker dengan Menhan dan Panglima TNI pada tanggal 23 September 2020 dalam rangka membahas isu-isu aktual, diantaranya:
  - 1) Rencana pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan Negara dan Peraturan Pelaksananya
  - 2) Penjelasan Kemhan terkait Alutsista yang dibiayai dari PHLN/KE
  - 3) Peran TNI dalam Penanganan Pandemi Covid-19 serta dalam mempersiapkan aspek pertahanan Indonesia dari ancaman penggunaan senjata biologi
  - 4) Kesiapan TNI dalam menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia di tengah meningkatnya ketegangan konflik Laut Cina Selatan
  - 5) Upaya TNI dalam mencegah terjadinya kembali bentrokan antara TNI dan Polri.Rapat dilaksanakan dalam Rapat bersifat tertutup.
- c. Raker dengan Kepala BIN pada tanggal 23 September 2020 dalam rangka membahas isu-isu aktual di bidang intelijen, antara lain:
  - 1) Implementasi dan langkah strategis BIN dengan terbitnya Perpres Nomor 73/Tahun 2020 pengganti Perpres Nomor 43/Tahun 2005
  - 2) Persiapan pembentukan pusat intelijen medik
  - 3) Peran dan Opsin BIN terhadap Pandemi Covid 19 saat ini dan masa yang akan datang
  - 4) Peran dan Opsin BIN terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak Desember 2020Rapat dilaksanakan dalam Rapat bersifat tertutup.
- d. Raker dengan Menkominfo pada tanggal 23 September 2020 dalam rangka membahas isu-isu aktual bidang kominfo, antara lain:

1) Progress report penanganan Covid-19 dan pelaksanaan kebijakan era tatanan baru

2) Progress report pembangunan infrastruktur TIK di era tatanan baru

Adapun kesimpulan Raker tersebut adalah sebagai berikut:

1) Komisi I DPR RI mengingatkan kembali kepada Kemkominfo agar dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di Indonesia khususnya wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) dilakukan secara berkesinambungan serta memperhatikan berbagai aspek secara inovatif dan komprehensif antara lain kesesuaian kebutuhan, lokasi, tata ruang sehingga memberikan kemanfaatan yang optimal kepada masyarakat.

2) Komisi I DPR RI mengapresiasi upaya dan langkah yang telah dilakukan Kemkominfo terkait dengan upaya Kemkominfo dalam penanganan pandemic Covid 19 antara lain pembuatan aplikasi PeduliLindungi, Chatbot COVID.GO.ID, Website COVID19.GO.ID, call center 112, 117, dan 119, serta SMS Blast.

## **2. Panja Pengawasan Komisi I DPR RI**

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021, 2 (dua) Panja Pengawasan Komisi I DPR RI bidang penanganan Covid-19, yaitu:

- a. Panja Pengawasan terhadap Informasi dan ICT dalam Masa Pandemi Covid-19
- b. Panja Perlindungan WNI dan Kinerja Perwakilan di Luar Negeri terkait Pandemi Global Covid-19

sedang menyusun Laporan Panja untuk disampaikan pada Rapat Intern Komisi I DPR RI pada awal Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021.

## **3. Kunker Spesifik Komisi I DPR RI**

Disamping melaksanakan Rapat-rapat bersama Mitra Kerja Komisi I DPR RI, untuk mengetahui kondisi faktual terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi I DPR RI, pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 Komisi I DPR RI telah melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi :

- a. Jawa Tengah (Solo) tanggal 18-20 September 2020 dalam rangka mengetahui pemanfaatan akses internet Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dalam mendukung proses pembelajaran di Era New Normal.
- b. Jawa Tengah (Semarang) tanggal 18-20 September 2020 dalam rangka mengetahui upaya dan dukungan Binda Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan Covid-19, pemetaan kerawanan Pilkada serentak Desember 2020 perkabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, dan deteksi dini pergerakan kelompok teroris dan pemetaan potensi ancaman teroris terhadap keamanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

- c. Jawa Barat (Cirebon) tanggal 2-4 Oktober 2020 dalam rangka mengetahui kesiapan peralatan dan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit TNI Ciremai, Cirebon dalam rangka penanganan Covid-19 di wilayah tugas.”
- d. DI Yogyakarta 2-4 Oktober 2020 dalam rangka dalam rangka mengetahui upaya dan dukungan Binda Provinsi DI Yogyakarta dalam penanganan Covid-19, pemetaan kerawanan Pilkada serentak Desember 2020 perkabupaten/kota di Provinsi DI Yogyakarta, dan deteksi dini pergerakan kelompok teroris dan pemetaan potensi ancaman teroris terhadap keamanan di wilayah Provinsi DI Yogyakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

#### **4. Kunker Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021**

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Mitra Kerja Komisi I DPR RI di daerah, pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021, yaitu pada tanggal 26-29 Oktober 2020, Komisi I DPR RI akan melaksanakan Kunker ke Provinsi:

- a. Sumatera Utara
- b. D.I. Yogyakarta
- c. Bali

#### **IV. PENUTUP**

Demikian Laporan Kegiatan Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021.

Jakarta, 19 Oktober 2020  
**KABAGSET. KOMISI I DPR RI,**

**SARTOMO, S.S., M.Si.**  
**NIP. 196808111996031001**